

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Anand, Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2004
- Budiono, Herlien. *Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2007
- Emma Nurita, R.A.. *CYBER NOTARY (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran)*. ctk. Kesatu. Bandung: Refika Aditama, 2012
- Hadi Sutopo, *Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 98.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* Jakarta: PT Sinar Grafika, 2005.
- HMT Sinaga, Sahat. *Notaris & Badan Hukum Indonesia*, Cet. 1, Bekasi: Jala Permata Aksara, 2019.
- J.Lloyd, Ian. *Informasi Technology Law-Second Edition* London: Butterworths, 1997.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. 2 (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm. 16.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. *Ke Notaris*, Depok: Raih Asa Mandiri. 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2005.

- Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyesuaian Dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 175.
- Lumban Tobing, GHS. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: PT Erlangga, 1983.
- Moechtar, Omar. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Cet. 1. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Roberto Aaron, 1999, *Electronic commerce :Enablers and Implications*, IEEE Communication Magazine, hlm. 47.
- Rusman, Deni Kurniawan, dan Cipi Riyana, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 78.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 20.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Thong Kie, Tan. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktik Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Herzin Inlandsch Reglement (HIR) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Indonesia. *Undang Undang No. 30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004. LN No. 117 tahun 2004. jo UU No. 2 tahun 2014 LN No. 3 tahun 2014. TLN No. 5491.

Indonesia. *Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No. 19 tahun 2016. LN No. 251 tahun 2016, TLN No. 5952. Jo UU No. 11 tahun 2008 LN No. 58 tahun 2008, TLN No. 4843.

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik*. Permenkominfo No. 11 tahun 2008. BNRI No. 1238 tahun 2018.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. PP No. 71 tahun 2019. LN No. 185 tahun 2019. TLN No. 6400.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 813/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt

Laporan Hasil Penelitian dan Media Internet

Balai Sertifikasi Elektronik, “*Cara Verifikasi Tanda Tangan Elektronik*”, <https://bsre.bssn.go.id/2021215-artikel-cara-verifikasi-tanda-tangan-elektronik>, diakses pada tanggal 2 Februari 2022

Kustodian Sentral Efek Indonesia, *Berita Pers: KSEI Realisasikan e-Proxy: Platform Pemberian Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik*, https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-184_berita_pers_ksei_realisasikan_e_proxy_platform_pemberian_kuasa_perwakilan_rups_secara_elektronik_20200519150002.pdf, diakses pada tanggal 15 November 2021

Ilham Choirul Anwar, *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi beserta Contohnya*, <https://tirto.id/pemanfaatan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-serta-contohnya-gbcx>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, *Daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia*, <https://tte.kominfo.go.id>, diakses pada tanggal 15 November 2021

Privy Id, “*Tanda Tangan Elektronik vs Tanda Tangan Digital*”, <https://blog.privy.id/tanda-tangan-elektronik-vs-tanda-tangan-digital/>, diakses pada tanggal 13 April 2021

Privy Id, “*Bagaimana Cara Menandatangani Dokumen dan Meminta Tanda Tangan Dengan Privy*”, <https://privy.id/id/panduan-penggunaan>, diakses pada tanggal 2 Februari 2022

Tahapary, Joan Venzka. “*Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata*,” Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Jakarta. 2011. lontar.ui.ac.id.

Jurnal Ilmiah

Khairandy, Ridwan. “Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce “become a popular prefixes for other terms associated with electronic Transaction” Jurnal Hukum Bisnis, 2001, vol.16, hlm. 57.

Sjahdeini, Sutan Remy. “Sistem Pengamanan E-Commerce”, Jurnal Hukum Bisnis vol 18, 2002, hlm. 9.

Wawancara

Wawancara dengan Notaris A, Notaris PPAT di wilayah Jakarta Selatan

Wawancara dengan Notaris B, Notaris PPAT di wilayah Jakarta Selatan

